



**LKIP**

**Laporan Kinerja  
Instansi Pemerintah**

**Tahun 2016**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**2017**

# PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara periodik. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kabupaten Kotawaringin Barat) Tahun 2016 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

**Pangkalan Bun, 9 Februari 2016**

**Kepala Bappeda  
Kab. Kotawaringin Barat**

**Drs. Wahyudi, M.Si  
NIP: 19630923 199003 1 010  
Pembina Utama Muda**



# IHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

Secara umum analisa capaian sasaran strategis BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :

Pencapaian sasaran strategis **Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah** memiliki rata-rata capaian indikator sasaran  $\geq 100$  persen (%). Dengan realisasi keuangan sebesar 91 (sembilan puluh satu) persen, maka bisa dikatakan bahwa sasaran strategis Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki efisiensi anggaran sebesar 9 (sembilan) persen.

Sasaran strategis **Sasaran Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Optimal** sangat berhasil dalam pencapaiannya, dengan rata-rata capaian indikator sasaran  $\geq 100$  persen (%). Dengan realisasi sebesar 88 (delapan puluh delapan) persen, maka terdapat efisiensi anggaran pada tahun 2016 sebesar 12 persen.

Sasaran strategis **Dokumen Tata Ruang yang Sinergis dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah** tidak berhasil dalam pencapaiannya, ini dikarenakan indikator sasaran tidak mencapai target untuk menetapkan perda tata ruang sebanyak 2 dokumen.

Pencapaian sasaran strategis **Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Optimal** memiliki rata-rata capaian indikator sasaran  $\pm 100$  persen (%). Dengan realisasi keuangan sebesar 88 persen, maka bisa dikatakan bahwa sasaran strategis Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Optimal memiliki efisiensi anggaran sebesar 12 (dua belas) persen.

Pencapaian sasaran strategis **Maksimalisasi Koordinasi Lintas Sektoral Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional** memiliki rata-rata capaian indikator sasaran  $\pm 100$  persen (%). Dengan realisasi keuangan sebesar 98 (sembilan puluh delapan) persen, maka bisa dikatakan bahwa sasaran strategis Maksimalisasi Koordinasi Lintas Sektoral Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional memiliki efisiensi anggaran sebesar 2 (dua) persen.

Pencapaian sasaran strategis **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda** memiliki rata-rata capaian indikator sasaran  $\geq 100$  persen (%). Dengan realisasi keuangan sebesar 96 (sembilan puluh enam) persen, maka bisa dikatakan bahwa sasaran strategis Maksimalisasi Koordinasi Lintas Sektoral Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional memiliki efisiensi anggaran sebesar 4 (empat) persen.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang baik dan tepat sasaran, dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, SDM perencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                    | <b>I</b>  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>                                                                                 | <b>II</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                        | <b>IV</b> |
| <b>DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....</b>                                                                            | <b>V</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                          | <b>VI</b> |
| <b>BAB. I. PENDAHULUAN .....</b>                                                                               | <b>1</b>  |
| 1.1 Struktur Organisasi.....                                                                                   | 2         |
| 1.2 Tugas dan Fungsi .....                                                                                     | 2         |
| 1.3 Keadaan Pegawai .....                                                                                      | 3         |
| 1.3.1 Kondisi Riil Pegawai Berdasar Jabatan .....                                                              | 3         |
| 1.3.2 Kondisi Riil Pegawai Berdasar Pendidikan .....                                                           | 4         |
| 1.4 Sarana dan Prasarana .....                                                                                 | 4         |
| 3.1 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....                                                       | 5         |
| <b>BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....</b>                                                          | <b>6</b>  |
| 2.1 Perencanaan Strategis.....                                                                                 | 6         |
| 2.1.1 Visi dan Misi.....                                                                                       | 9         |
| 2.1.2 Tujuan dan Sasaran .....                                                                                 | 10        |
| 3.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .....                                                                        | 12        |
| 3.3 Rencana Anggaran Tahun 2016 .....                                                                          | 13        |
| 2.2 Instrumen Pendukung.....                                                                                   | 13        |
| 2.4.1 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA)                                           | 13        |
| 2.4.2 Sistem Informasi Pelaporan Daerah (SIPORDA).....                                                         | 14        |
| 2.4.3 Sistem Aplikasi SIPD .....                                                                               | 14        |
| <b>BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                                                   | <b>15</b> |
| 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016.....                                                                            | 15        |
| 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Perbandingan Pencapaian Target Tahun Lalu .....            | 16        |
| 3.2.1 Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.                                          | 16        |
| 3.2.2 Sasaran Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Optimal .....                                | 17        |
| 3.2.3 Sasaran Dokumen Tata Ruang yang Sinergis dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah .....             | 17        |
| 3.2.4 Sasaran Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Optimal .....      | 18        |
| 3.2.5 Sasaran Maksimalisasi Koordinasi Lintas Sektoral Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional ..... | 20        |
| 3.2.6 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda .                                          | 21        |
| <b>BAB. IV. PENUTUP .....</b>                                                                                  | <b>22</b> |

# DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABEL 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 .....                | 4  |
| TABEL 1.3. Jumlah Aset Berdasarkan Jenis .....                                           | 4  |
| TABEL 2.1. Indikator Target Tujuan dan Sasaran Renstra Bapeda Kab.Kobar Tahun 2016 ..... | 6  |
| TABEL 2.2. Target Sasaran Kinerja Renstra Bapeda Kab.Kobar.....                          | 11 |
| TABEL 2.3. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.....       | 12 |
| TABEL 2.4. Target Belanja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016.....           | 13 |
| TABEL 3.1. Skala Peringkat Kinerja .....                                                 | 15 |
| GRAFIK 1.1. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin .....             | 3  |

# LAMPIRAN

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LAMPIRAN 1 : Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 ... |  |
| LAMPIRAN 2 : Perencanaan Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016.   |  |
| LAMPIRAN 3 : Capaian Realisasi Kinerja Fisik Tahun 2015 & Tahun 2016 .....           |  |
| LAMPIRAN 4 : Matriks Analisis Efisiensi Sumber Daya Tahun 2015 .....                 |  |
| LAMPIRAN 5 : Matriks Analisis Efisiensi Sumber Daya Tahun 2016 .....                 |  |
| LAMPIRAN 6 : Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....                                      |  |

**Bab 1 Berisi :**

1. Struktur Organisasi
2. Fungsi dan Tugas
3. Keadaan Pegawai
4. Keadaan Sarana dan Prasarana
5. Sistematika LK IP

# BAB 1

# PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) telah mendorong pemerintah dengan melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK IP).

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia.

Beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Mendorong BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, didalam pelaksanaan program kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **1.1 Struktur Organisasi**

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 merupakan unsur staf teknis dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, terdiri dari :

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Umum, Kepegawaian & Perlengkapan, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Perencanaan & Pengendalian Program;
2. Bidang Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Bidang Ekonomi, yang terdiri dari Sub Bidang Pertanian, Pertambangan & Industri dan Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
4. Bidang Sarana & Prasarana, yang terdiri dari Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dan Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
5. Bidang Statistik yang terdiri dari Sub Bidang Statistik dan Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan.

### **1.2 Tugas dan Fungsi**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan Kabupaten, penataan ruang, perencanaan penanaman modal, statistik kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi perencanaan pembangunan di daerah
2. Penelitian dan kajian perencanaan semua bidang pembangunan
3. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
4. Penetapan perencanaan pembangunan daerah secara terpadu
5. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

7. Sinkronisasi perencanaan bidang-bidang pembangunan di daerah
8. Statistik, Penelitian dan Pengembangan.
9. Penataan ruang.
10. Pengendalian serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

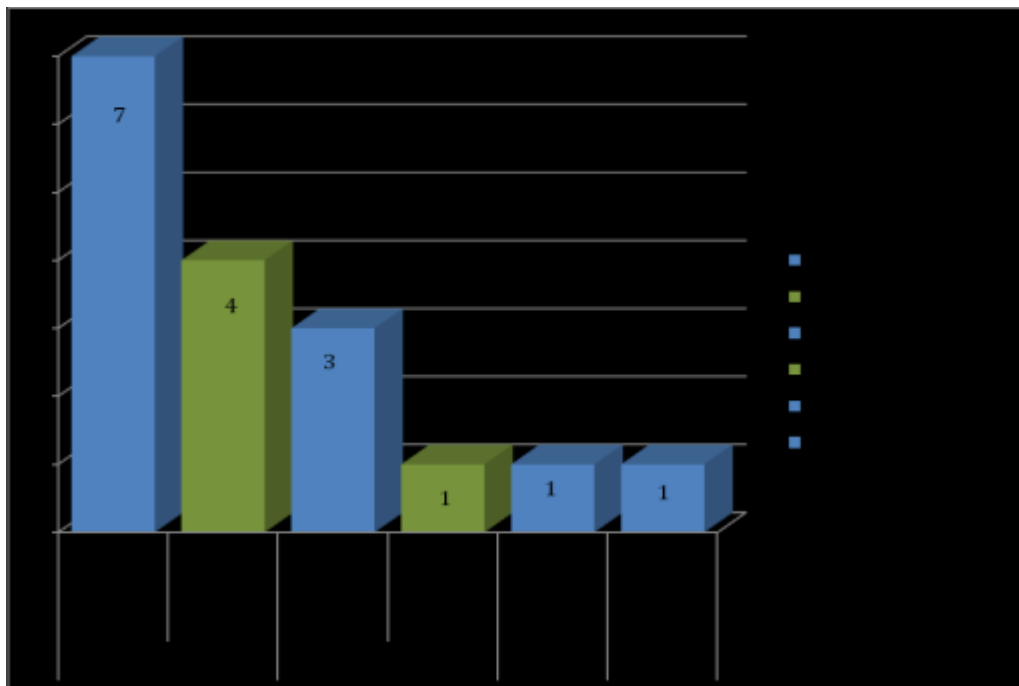
### 1.3 Keadaan Pegawai

#### 1.3.1 Kondisi Riil Pegawai Berdasar Jabatan

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, begitu pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya.

Sumber Daya manusia (SDM) di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2016, tercatat sebanyak 35 orang yang terdiri dari 17 orang pejabat struktural, 18 orang fungsional umum. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan diuraikan sebagai berikut :

Pejabat struktural di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Jumlah pejabat struktural di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dijelaskan pada Berikut :



Sumber : BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Gambar 1. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan jenis Kelamin

### 1.3.2 Kondisi Riil Pegawai Berdasar Pendidikan

Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2016 seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

| No    | Klasifikasi Pendidikan | Jumlah |
|-------|------------------------|--------|
| 1.    | Sarjana S2             | 4      |
| 2.    | Sarjana S1             | 20     |
| 3.    | Diploma III (DIII)     | 4      |
| 4.    | SLTA                   | 7      |
| Total |                        | 35     |

Sumber : BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 2016

Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin diatas didistribusikan dalam struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kapasitas yang dimiliki tiap pegawai. Sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi pendidikan S-1 (20 orang atau 57,14%), dan pegawai dengan pendidikan SLTA (7 orang atau 20%). Kondisi pegawai dengan persentase diatas secara umum jika dilihat dari segi kuantitas masih sangat kurang memadai, namun dalam segi kualitas jumlah personil di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi.

### 1.4 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat sejauh ini dirasakan cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2. berikut ini.

Tabel 1.2. Jumlah Aset Berdasarkan Jenis

| Jenis Peralatan                   | Jumlah   |
|-----------------------------------|----------|
| Kendaraan roda 4                  | 2 buah   |
| Kendaraan roda 2                  | 20 buah  |
| Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 715 buah |
| GPS                               | 1 buah   |
| Alat Studio dan komunikasi        | 18 buah  |

Sumber: BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 2016

Sarana dan prasarana tersebut mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 adalah sebagai berikut:

#### **Ringkasan Eksekutif Memuat :**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/Manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, Potensi yang menjadi ruang lingkup SKPD, dan Sistematika penulisan LKIP.

#### **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

#### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan, kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

**Bab 2 Berisi :**

1. *Perencanaan Kinerja*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2016*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2016*
4. *Instrumen Pendukung*

## BAB 2

# PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Perencanaan Strategis

Untuk mendukung rencana strategis Bupati Kotawaringin Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga merumuskan rencana strategis, yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kotawaringin Barat. Tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada lampiran 1.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak perubahan yang harus dilakukan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan terkait dengan efektifitas dan efisiensi kinerja instansi. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mengubah tujuan serta sasaran dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. Perubahan pada target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran BAPPEDA perlu dilakukan agar laporan menjadi lebih sistematis dan akuntabel. Sejatinya, hasil perubahan Indikator Target Tujuan serta Sasaran Renstra digunakan sebagai panduan, dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja Bappeda sampai dengan tahun akhir RPJMD.

Akan tetapi, perubahan dalam indikator kinerja Renstra Bappeda tidak dapat terealisasi sampai akhir Tahun perencanaan. Hal ini disebabkan karena, perubahan Renstra mengakibatkan serangkaian perubahan dari dokumen perencanaan lainnya. Mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan biaya yang dibutuhkan, maka perubahan Renstra urung dilakukan. Tabel berikut menjelaskan tentang Indikator Target Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2016.

Tabel 2.1. Indikator Target Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

| Tujuan                                     | Sasaran                                                                                                       | Indikator Kinerja               | Target |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| Tersusunnya Perencanaan Pembangunan daerah | Terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan Penyusunan penganggaran. | 1 Jumlah RPJM yang diperdakan   | 0      |
|                                            |                                                                                                               | 2 Jumlah RKPD yang diperkadakan | 1      |

| Tujuan                                                                          | Sasaran                                                                                | Indikator Kinerja                                                    | Target |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                 |                                                                                        | 3 Jumlah RPJP Review yang Diperdakan                                 | 0      |
|                                                                                 |                                                                                        | 4 Jumlah aplikasi (SIPPD)                                            | 1      |
| Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah                    | Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang optimal.                           | 1 Jumlah penelitian yang dihasilkan                                  | 1      |
|                                                                                 |                                                                                        | 2 Jumlah penelitian yang dijadikan pedoman dalam perenc. pembangunan | 4      |
| Terlaksananya tata ruang daerah                                                 | Dokumen tata ruang yang sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.        | 1 Jumlah rapat BKPRD                                                 | 4      |
|                                                                                 |                                                                                        | 2 Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun                            | 2      |
| Terlaksananya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan makro dan mikro | Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal. | 1 Jumlah rapat evaluasi bulanan (TEPRA)                              | 8      |
|                                                                                 |                                                                                        | 2 Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi triwulan                   | 3      |
|                                                                                 |                                                                                        | 3 evaluasi tahunan & rencana anggaran tahun berikutnya               | 1      |
|                                                                                 |                                                                                        | 4 Jumlah LKPJ                                                        | 2      |
|                                                                                 |                                                                                        | 5 Jumlah Rakor DAK dan TP                                            | 3      |
|                                                                                 |                                                                                        | 6 Jumlah Rakor PM2L                                                  | 3      |
|                                                                                 |                                                                                        | 7 Jumlah Rkr pninggulangan Kemiskinan                                | 3      |
|                                                                                 |                                                                                        | 8 Jumlah Rapat MDGs                                                  | 2      |
|                                                                                 |                                                                                        | 9 Jumlah Rkr Desa tertinggal                                         | 2      |
|                                                                                 |                                                                                        | 10 Jumlah Rakor pengendalian Inflasi daerah                          | 2      |
|                                                                                 |                                                                                        | 11 Jumlah Rakor Makro Mikro                                          | 1      |
|                                                                                 |                                                                                        | 12 Jumlah Rakor Bid. Ekonomi                                         | 4      |
|                                                                                 |                                                                                        | 13 Jumlah rkr Bid. Sarpras                                           | 4      |
|                                                                                 |                                                                                        | 14 Jumlah Rakor Pemkesra                                             | 4      |
|                                                                                 |                                                                                        | 15 Jumlah Rapat Internal Bapp.                                       | 1      |
|                                                                                 |                                                                                        | 16 Jumlah Monev pembangunan daerah                                   | 2      |
|                                                                                 |                                                                                        | 17 Prosentase program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD                | 100%   |

| Tujuan                                                                              | Sasaran                                                                                     | Indikator Kinerja                            | Target |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| Terlaksananya perencanaan sektoral antar kabupaten, propinsi dan Nasional           | Maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. | 1 Jumlah kerjasama antar daerah              | 2      |
|                                                                                     |                                                                                             | 2 Jumlah Musrenbang Kecamatan                | 6      |
|                                                                                     |                                                                                             | 3 Jumlah Forum BAPPEDA                       | 1      |
|                                                                                     |                                                                                             | 4 Jumlah musrenbang Kabupaten                | 1      |
| Terlaksananya koordinasi perencanaan penanaman Modal tingkat kabupaten dan provinsi | Optimalisasi koordinasi perencanaan penanaman modal.                                        | 1 Rapat koordinasi penanaman modal           | 2      |
| Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda                                          | Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda                                       | 1 Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi | 1      |
|                                                                                     |                                                                                             | 2 Jumlah pegawai yang terlatih               | 5      |
|                                                                                     |                                                                                             | 3 Jumlah SOP yang tersusun                   | 1      |
|                                                                                     |                                                                                             | 4 Jumlah Anggaran                            |        |

Perubahan dalam laporan, terkait perubahan sasaran strategis dan target-target yang akan dicapai didasari atas sebab-sebab sebagai berikut :

1. Indikator kinerja jumlah penelitian yang dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan tidak dikaji dalam laporan, sebab indikator tersebut dinilai kurang relevan lagi, sebab semua bahan kajian dan penelitian yang dihasilkan oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat memang ditujukan untuk dasar pengambil kebijakan dalam menentukan prioritas perencanaan pembangunan.
2. Indikator jumlah rapat BKPRD tidak dikaji dalam laporan, sebab jumlah rapat BKPRD merupakan bagian dari Jumlah Rakor Bidang Sarana Prasarana.
3. Indikator jumlah rapat Evaluasi Tahunan & Rencana Anggaran Tahun Berikutnya tidak dikaji dalam laporan, sebab rapat tersebut bagian dari Jumlah Rapat Internal Bappeda.
4. Indikator jumlah Rakor PM2L, Rakor Penanggulangan Kemiskinan, & Rakor MDGs tidak dikaji dalam laporan, sebab rapat tersebut bagian dari Jumlah Rakor Bidang Pemkesra.
5. Indikator jumlah Rakor DAK dan TP tidak dikaji dalam laporan, sebab Rakor DAK dan TP dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang membidangi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Perkebunan.

6. Indikator jumlah Rakor TEPPA dulu adalah istilah untuk Rapat Evaluasi Bulanan yang sekarang lebih dikenal dengan istilah TEPPA.
7. Indikator jumlah Rakor pengendalian Inflasi daerah tidak dikaji dalam laporan, sebab yang berwenang melakukan pengendalian inflasi adalah Dinas Perindustrian & Perdagangan.
8. Indikator jumlah kerjasama antar daerah tidak dikaji dalam laporan, sebab instansi yang berwenang untuk melakukan kerjasama antar daerah adalah Sekretariat Daerah.
9. Indikator jumlah Rakor koordinasi penanaman modal tidak dikaji dalam laporan, sebab instansi yang berwenang untuk melakukan Rapat koordinasi penanaman modal adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTP).
10. Indikator jumlah SOP yang tersusun tidak dikaji dalam laporan, sebab tidak adanya target yang mendasari.
11. Indikator jumlah anggaran tidak dikaji dalam laporan, mengingat belum diketahui perumusan jumlah anggaran ideal per-tahun untuk memenuhi target kinerja Bappeda.

### **2.1.1 Visi dan Misi**

Tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang tertuang didalam RPJMD 2012-2016. Visi yang dituangkan dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016 adalah sebagai berikut :

#### ***"TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS"***

Maksud dari visi di atas adalah menjadikan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan perubahan dalam menghasilkan suatu perencanaan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, berkualitas, sinergis dan terintegrasi untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang maju dan sejahtera.

Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat harus menjalankan fungsi pengendalian yang kredibel agar perencanaan pembangunan yang sudah disusun dapat diwujudkan sesuai dengan target pembangunan yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan, pelaksanaan koordinasi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat. Selanjutnya misi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Bappeda;
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Daerah yang Berkualitas.

**Misi Pertama.** Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Bappeda merupakan upaya organisasi untuk menghasilkan kualitas kelembagaan Bappeda yang profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas aparatur bappeda, peningkatan sarana yang efektif dan efisien dan prasarana yang memadai.

**Misi Kedua.** Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan sistem penganggaran pembangunan daerah. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang ideal diperlukan koordinasi, sinergi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

**Misi Ketiga,** merupakan pernyataan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mewujudkan terbangunnya sistem pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan manfaat pengendalian dalam manajemen pembangunan daerah.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dan sasaran perubahan seperti dijelaskan pada Tabel 2.1, maka target sasaran kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 dan tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Target Sasaran Kinerja Renstra BAPPEDA Kab.Kotawaringin Barat

| No | Sasaran                                                                                                   | Indikator Kinerja                                             | Target |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|
|    |                                                                                                           |                                                               | 2015   | 2016 |
| 1  | Terwujudnya dokumen Perenc. Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan Penyusunan penganggaran. | 1 Jumlah RKPD yang Diperkadakan                               | 1      | 1    |
|    |                                                                                                           | 2 Jumlah aplikasi (SIPPD)                                     | 1      | 1    |
| 2  | Penelitian dan pengembangan pemb. daerah yang optimal.                                                    | 1 Jumlah penelitian                                           | 1      | 1    |
| 3  | Dokumen tata ruang yang sinergis dengan dokumen perenc. pembangunan daerah.                               | 1 Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun                     | 2      | 2    |
| 4  | Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal.                    | 1 Jumlah rapat evaluasi bulanan (TEPRA)                       | 8      | 8    |
|    |                                                                                                           | 2 Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi triwulan (Rakordal) | 3      | 3    |
|    |                                                                                                           | 3 Jumlah LKPJ                                                 | 1      | 2    |
|    |                                                                                                           | 4 Jumlah Rakor Bidang Ekonomi                                 | 4      | 4    |
|    |                                                                                                           | 5 Jumlah rakor Bidang sarana prasarana                        | 4      | 4    |
|    |                                                                                                           | 6 Jumlah Rakor Pemkesra                                       | 4      | 4    |
|    |                                                                                                           | 7 Jumlah Rapat Internal Bappeda                               | 1      | 1    |
|    |                                                                                                           | 8 Jumlah Monev pembangunan daerah                             | 2      | 2    |
|    |                                                                                                           | 9 Prosentase program RPJMD yg tertuang dalam RAPBD            | 100%   | 100% |
| 5  | Maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.               | 1 Jumlah Musrenbang Kecamatan                                 | 6      | 6    |
|    |                                                                                                           | 2 Jumlah Forum Bappeda                                        | 1      | 1    |
|    |                                                                                                           | 3 Jumlah musrenbang Kabupaten                                 | 1      | 1    |
| 6  | Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda                                                     | 1 Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi                  | 1      | 1    |
|    |                                                                                                           | 2 Jumlah pegawai yang terlatih                                | 5      | 5    |

Sumber: BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. 2016

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran. Mengacu pada sasaran yang telah ditentukan, tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun Anggaran 2016 :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

| No. | Sasaran                                                                                                | Indikator Kinerja                                             | Target       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Terwujudnya dok. Perenc. Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan Penyusunan penganggaran. | 1 Jumlah RKPD yang Diperkadakan                               | 1 Dokumen    |
|     |                                                                                                        | 2 Jumlah aplikasi (SIPPD)                                     | 1 Aplikasi   |
| 2.  | Penelitian dan pengembangan pemb. daerah yang optimal.                                                 | 1 Jumlah penelitian yang dihasilkan                           | 1 Dokumen    |
| 3.  | Dokumen tata ruang yang sinergis dengan dokumen perenc. pembangunan daerah.                            | 1 Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun                     | 2 Dokumen    |
| 4.  | Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal.                 | 1 Jml rapat evaluasi bulanan (TEPRA)                          | 8 kali Rapat |
|     |                                                                                                        | 2 Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi triwulan (Rakordal) | 3 kali Rapat |
|     |                                                                                                        | 3 Jml LKPJ                                                    | 2 Dokumen    |
|     |                                                                                                        | 4 Jml Rakor Bidang Ekonomi                                    | 4 kali Rapat |
|     |                                                                                                        | 5 Jml rakor Bidang Sarpras                                    | 4 kali Rapat |
|     |                                                                                                        | 6 Jumlah Rakor Pemkesra                                       | 4 kali Rapat |
|     |                                                                                                        | 7 Jumlah Rapat Internal Bappeda                               | 1 kali Rapat |
|     |                                                                                                        | 8 Jml Monev Pembangunan Daerah                                | 2 Kunjungan  |
|     |                                                                                                        | 9 Prosentase program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD          | 100 %        |
| 5.  | Maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi & Nasional.              | 1 Jumlah Musrenbang Kecamatan                                 | 6 kali Rapat |
|     |                                                                                                        | 2 Jumlah Forum BAPPEDA                                        | 1 kali Rapat |
|     |                                                                                                        | 3 Jumlah musrenbang Kabupaten                                 | 1 kali Rapat |
| 6.  | Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda                                                  | 1 Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi                  | 1 Buah       |
|     |                                                                                                        | 2 Jumlah pegawai yang terlatih                                | 5 Pegawai    |

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. 2016

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2016

Perencanaan pelaksanaan kegiatan BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat menetapkan target belanja sebesar Rp 6.553.487.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.2.974.272.000,-(Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) & Belanja Langsung Rp 3.579.215.000,-(Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Tabel 2.4. Target Belanja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat TA 2016

| Uraian                 | Target              | Prosentase |
|------------------------|---------------------|------------|
| Belanja Tidak Langsung | Rp 2.974.272.000,00 | 45%        |
| Belanja Langsung       | Rp 3.579.215.000,00 | 55%        |
| Jumlah                 | Rp 6.553.487.000,00 | 100%       |

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. 2016

## 2.4 Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat. BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat baik dalam hal meningkatkan kapasitas BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

### 2.4.1 Sistem Informasi Perencanaan (SISRENBANGDA)

SISRENBANGDA (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ) dengan alamat <http://203.130.214.218/sisrenbangdakobar/menu.asp>, berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan ini dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai ditetapkannya KUA PPAS;

### 2.4.2 Sistem Informasi Pelaporan Daerah (SIPORDA)

Sistem Informasi Pelaporan Daerah (SIPORDA). Sistem Informasi ini dikembangkan untuk mempermudah SKPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap SKPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;

### **2.4.3 Sistem Aplikasi SIPD**

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data perencanaan dengan tujuan untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan yang berasal dari semua stakeholder penyedia data baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sistem informasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan data perencanaan yang harus disediakan.

**Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2016*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis*
4. *Capaian Kinerja Lainnya*
5. *Akuntabilitas Anggaran*

# BAB 3

# Akuntabilitas Kinerja

## 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan pada Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur, yang hasilnya akan memberikan gambaran terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala Peringkat Kinerja

| No | Interval                         | Kategori Capaian |
|----|----------------------------------|------------------|
| 1. | Capaian $\geq 91$                | Sangat Berhasil  |
| 2. | $76 \leq \text{Capaian} \leq 90$ | Berhasil         |
| 3. | $66 \leq \text{Capaian} \leq 75$ | Cukup Berhasil   |
| 4. | $51 \leq \text{Capaian} \leq 65$ | Kurang Berhasil  |
| 5. | Capaian $\leq 50$                | Tidak Berhasil   |

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 serta tahun 2016 beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam lampiran **Capaian Realisasi Kinerja Fisik Tahun 2015 & Tahun 2016**.

Dari perolehan data tabel Tahun 2016, terdapat 6 sasaran strategis yang memiliki 18 indikator sasaran. Terdapat 1 indikator sasaran dengan kategori capaian tidak berhasil, 1 indikator sasaran dengan kategori capaian cukup berhasil dan 16 indikator sasaran lainnya dengan kategori capaian sangat berhasil.

Hal ini menunjukkan bahwa, secara garis besar Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan kinerja baik.

### 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya serta Perbandingan dengan Pencapaian Target Tahun Lalu

Rumusan yang digunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja strategis disini adalah persentase antara realisasi kinerja yang tercapai dengan target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja Tahun 2016. Untuk selanjutnya, formula yang digunakan sebagai dasar penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realiasi Kinerja Tahun 2016/2015}}{\text{Target Kinerja Tahun 2016/2015}} \times 100\%$$

Penjelasan masing-masing tentang pencapaian target kinerja Bappeda Tahun 2016 akan diuraikan sebagai berikut :

#### 3.2.1 Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 2 (dua) indikator sasaran, yaitu jumlah RKPD yang di-Perdakan dan Jumlah aplikasi (SIPPD).

Capaian indikator sasaran jumlah **RKPD yang di-Perdakan** melebihi target dengan persen (%) realisasi fisik sejumlah 200 persen atau 2 (dua) dokumen dengan target 1 (satu) dokumen.

Dokumen dimaksud antara lain RKPD Kabupaten Kotawaringin barat Tahun 2017 dan RKPD Perubahan Kabupaten Kotawaringin barat Tahun 2016. Program yang mendukung pencapaian taget tersebut antara lain Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan pendukung pencapaian taget tersebut antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD dengan pagu sebesar Rp. 37.205.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.705.000,- dan persen realisasi sebesar 88 persen.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan pagu sebesar Rp. 165.379.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 161.840.000,-. Persen realisasi sebesar 98 persen.
3. Kegiatan Penetapan RKPD dengan pagu sebesar Rp. 57.464.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.840.500,- dan persen realisasi sebesar 94 persen.

Capaian indikator sasaran Jumlah aplikasi (SIPPD) melebihi target dengan persen (%) realisasi fisik sejumlah 200 persen atau 2 (dua) buah aplikasi. Aplikasi dimaksud adalah SISRENBANGDA dan SIPORDA yang digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah di lingkup Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat. Program yang mendukung pencapaian taget tersebut antara lain :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, memiliki pagu sebesar Rp.140.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 115.280.000,- dan persen realisasi sebesar 82 persen.

Capaian kinerja fisik Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 memiliki rata-rata 133 (seratus tiga puluh tiga) persen yang mengindikasikan sasaran tersebut sangat berhasil. Total capaian realisasi keuangan kegiatan yang mendukung Rp. 363.665.500,- dengan pagu anggaran sebesar Rp.400.048.500,-. Total realisasi keuangan 91 persen. Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 9 persen atau Rp. 36.383.000,-.

Capaian total kinerja fisik Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 memiliki rata-rata 200 (dua ratus) persen, dengan realisasi keuangan sebesar 69 (enam puluh sembilan) persen. Berarti ada sisa anggaran sebesar 31 (tiga puluh satu) persen.

Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, perencanaan dan penganggaran tahun 2016 untuk sasaran **Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah** lebih terkoordinir dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan optimum.

### **3.2.2 Sasaran Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Optimal**

Sasaran **Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Optimal** mempunyai 1 (satu) indikator sasaran, yaitu adanya Jumlah Penelitian yang Dihasilkan.

Capaian indikator sasaran **Jumlah Penelitian yang Dihasilkan** mencapai target dengan persen (%) realisasi fisik sejumlah 200 persen atau 2 (dua) dokumen dengan target 1 (satu) dokumen. Dokumen dimaksud antara lain **Penyusunan Dokumen Master Plan dan Detail Minapolitan Perairan Umum** serta **Kajian Pengembangan Kawasan Aren Sebagai Komoditas Unggulan Daerah**. Program yang mendukung pencapaian target tersebut antara lain Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah :

1. Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah, memiliki pagu sebesar Rp. 211.502.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 185.216.901,-.
2. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat, memiliki pagu sebesar Rp. 213.701.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 187.566.000,-.

Total kedua anggaran kegiatan tersebut adalah Rp. 425. 204.400,- dengan realisasi sebesar 88 (delapan puluh delapan) persen.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat efisiensi anggaran pada tahun 2016 sebesar 12 persen atau Rp. 52.421.499,-.

Rata-rata capaian total kinerja fisik Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 juga sangat berhasil, dengan realisasi keuangan sebesar 90 (sembilan puluh) persen. Berarti hanya terdapat sisa anggaran sebesar 10 (sepuluh) persen.

Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, perencanaan dan penganggaran tahun 2015 dan tahun 2016 untuk sasaran **Penelitian & Pengembangan Pembangunan Daerah yang Optimal**, kurang lebih menunjukkan kinerja yang sama baiknya.

### **3.2.3 Sasaran Dokumen Tata Ruang yang Sinergis dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sasaran **Dokumen Tata Ruang yang Sinergis dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah** mempunyai 1 (satu) indikator sasaran, yaitu Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Tersusun.

Capaian indikator sasaran Jumlah Dokumen Tata Ruang yang Tersusun tidak berhasil mencapai target dengan persen (%) realisasi fisik sejumlah 0 (nol) persen dari 2 dokumen yang ditargetkan. Program pendukung pencapaian target tersebut adalah :

1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, memiliki pagu sebesar Rp. 116.670.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 86.257.001,- dan persen realisasi sebesar 74 persen.
2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah & Besar dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, memiliki pagu sebesar Rp. 76.363.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.818.750,- dan persen realisasi sebesar 81 persen.

Total kedua anggaran kegiatan tersebut adalah Rp. 193.033.750,- dengan realisasi sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) persen.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat tidak efisiensi anggaran pada tahun 2016.

Rata-rata capaian total kinerja fisik Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 juga tidak berhasil, dengan realisasi fisik hanya sebesar 50 (lima puluh) persen.

Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, perencanaan dan penganggaran tahun 2015 dan tahun 2016 untuk sasaran **Dokumen Tata Ruang yang Sinergis dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**, menunjukkan kinerja yang sama.

### **3.2.4 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Optimal**

Capaian indikator Sasaran **Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Optimal** dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Capaian indikator Sasaran **Jumlah Rapat Evaluasi Bulanan (TEPRA) dan Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Triwulan (Rakordal)** mencapai target dengan persen (%) realisasi fisik rata-rata sejumlah 100 persen. Program yang mendukung pencapaian target Indikator Sasaran adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah, kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memiliki pagu sebesar Rp. 254.890.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 245.701.000,- dan realisasi sebesar 96 persen.
2. Capaian indikator Sasaran **Jumlah LKPJ** mencapai target dengan persen (%) realisasi fisik sebesar 100 persen. Program yang mendukung pencapaian target Indikator Sasaran adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), memiliki pagu sebesar Rp. 131.596.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 118.082.000,- dan realisasi sebesar 90 persen.

3. Capaian indikator Sasaran **Jumlah Rakor Bidang Ekonomi** mencapai target dengan persen (%) realisasi fisik sejumlah 75 (tujuh puluh lima) persen. Program yang mendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, memiliki pagu sebesar Rp. 86.239.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.864.000,- dan persen realisasi sebesar 59 (lima puluh sembilan) persen.
4. Capaian indikator Sasaran **Jumlah Rakor Bidang Sarana Prasarana** mencapai target dengan persen (%) realisasi fisik sejumlah 275 (tujuh puluh lima) persen. Program yang mendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain :
  1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah & Besar dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, memiliki pagu sebesar Rp. 76.363.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.818.750,- dan persen realisasi sebesar 81 (delapan puluh satu) persen.
  2. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah, memiliki pagu sebesar Rp. 56.133.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.699.950,- dan persen realisasi sebesar 71 (tujuh puluh satu) persen.
5. Capaian indikator Sasaran **Jumlah Rakor Pemkesra** mencapai target dengan persen (%) realisasi fisik sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) persen. Program yang mendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, memiliki pagu sebesar Rp. 95.125.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.915.300,- dan persen realisasi sebesar 93 (sembilan puluh tiga) persen.
6. Capaian indikator Sasaran **Jumlah Rapat Internal Bappeda** mencapai target dengan persen (%) realisasi fisik sejumlah 2.000 (dua ribu) persen. Program yang mendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Penyediaan Makanan dan Minuman, memiliki pagu sebesar Rp. 34.420.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.200.000,- dan persen realisasi sebesar 76 (tujuh puluh enam) persen.
7. Capaian indikator Sasaran **Jumlah Monev Pembangunan Daerah** mencapai target dengan persen (%) realisasi fisik sejumlah 850 (lima ratus) persen. Program yang mendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain :
  1. Program yang mendukung pencapaian target indikator sasaran, adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, memiliki pagu sebesar Rp. 254.890.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 245.701.000,- dan persen realisasi sebesar 96 (sembilan puluh enam) persen.

2. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, memiliki pagu sebesar Rp. 60.709.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.649.000,- dan realisasi sebesar 78 (tujuh puluh delapan) persen.
8. Capaian indikator Sasaran **Prosentase Program RPJMD yang Tertuang dalam RAPBD** mencapai target dengan persen (%) realisasi fisik sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) persen. Program yang mendukung pencapaian target indikator tersebut antara lain Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Penetapan RKPD, memiliki pagu sebesar Rp. 57.464.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.840.500,- dan persen realisasi sebesar 94 (sembilan puluh empat) persen.

Capaian kinerja fisik Sasaran **Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Optimal** Tahun 2016 memiliki rata-rata 100 persen yang mengindikasikan sasaran tersebut berhasil. Total capaian realisasi keuangan kegiatan yang mendukung Rp. 978.471.500,- dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.107.830.250,-. Jadi, capaian realisasi keuangan sasaran **Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Optimal** sebesar 88 persen.

Dari penjelasan tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar 12 persen atau Rp. 129.358.750,-.

Rata-rata capaian total kinerja fisik Sasaran Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 juga berhasil, dengan realisasi keuangan sebesar 88 (delapan puluh delapan) persen.

Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, perencanaan dan penganggaran tahun 2015 dan tahun 2016 untuk sasaran **Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Optimal**, menunjukkan kinerja yang sama.

### **3.2.5 Sasaran Maksimalisasi Koordinasi Lintas Sektorial Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional**

Sasaran **Maksimalisasi Koordinasi Lintas Sektorial Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional** mempunyai 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu Jumlah Musrenbang Kecamatan, Jumlah Forum Bappeda dan Jumlah Musrenbang Kabupaten. Tiga indikator sasaran tersebut didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan penunjang Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Kegiatan tersebut memiliki pagu sebesar Rp. 165.379.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 161.840.000,- dan persen realisasi sebesar 98 persen. Karena capaian kinerja fisik Sasaran **Maksimalisasi Koordinasi Lintas Sektorial Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional** 100 persen, dan kinerja realisasi keuangan sebesar 98 persen. Bisa disimpulkan bahwa terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.539.000,-.

Rata-rata capaian total kinerja fisik Sasaran **Maksimalisasi Koordinasi Lintas Sektorial Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional** Tahun 2015 juga berhasil, dengan realisasi keuangan sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen.

Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, perencanaan dan penganggaran tahun 2015 dan tahun 2016 untuk sasaran **Maksimalisasi Koordinasi Lintas Sektorial Antar Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional**, menunjukkan kinerja yang sama.

### 3.2.6 Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda

Capaian sasaran **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda** mempunyai 2 (dua) indikator sasaran, yaitu :

1. Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi berhasil melebihi target dengan persen (%) realisasi fisik sejumlah 2.200 persen. Program yang mendukung pencapaian target tersebut antara lain :
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor, memiliki pagu sebesar Rp. 28.850.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.25.934.561,- dan persen realisasi sebesar 90 persen.
  - Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah :
    - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, memiliki pagu sebesar Rp.32.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.31.920.000,- dan persen realisasi sebesar 100 persen.
    - Pengadaan Mebeleur, memiliki pagu sebesar Rp.30.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.30.000.000,- dan persen realisasi sebesar 100 persen.
    - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, memiliki pagu sebesar Rp.55.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.47.618.000,- dan persen realisasi sebesar 87 persen.
2. Jumlah Pegawai yang Terlatih berhasil melebihi target dengan persen (%) realisasi fisik sejumlah 300 persen. Program yang mendukung pencapaian target tersebut **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan kegiatan yang mendukung Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan tersebut memiliki pagu sebesar Rp. 115.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.490.012,- dan persen realisasi sebesar 85 persen.

Karena capaian kinerja fisik Sasaran **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda**  $\geq$  100 persen, dan kinerja realisasi keuangan sebesar 96 persen. Maka bisa disimpulkan bahwa terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 27.887.427,-.

Rata-rata capaian total kinerja fisik Sasaran **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda** Tahun 2015 juga berhasil, dengan realisasi keuangan sebesar 98 (sembilan puluh delapan) persen.

Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, perencanaan dan penganggaran tahun 2015 dan tahun 2016 untuk sasaran **Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bappeda**, menunjukkan kinerja yang sama.

# BAB 4

# PENUTUP

**Bab 1 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Saran*

Penyelenggaraan kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun terakhir dari Rencana strategis BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

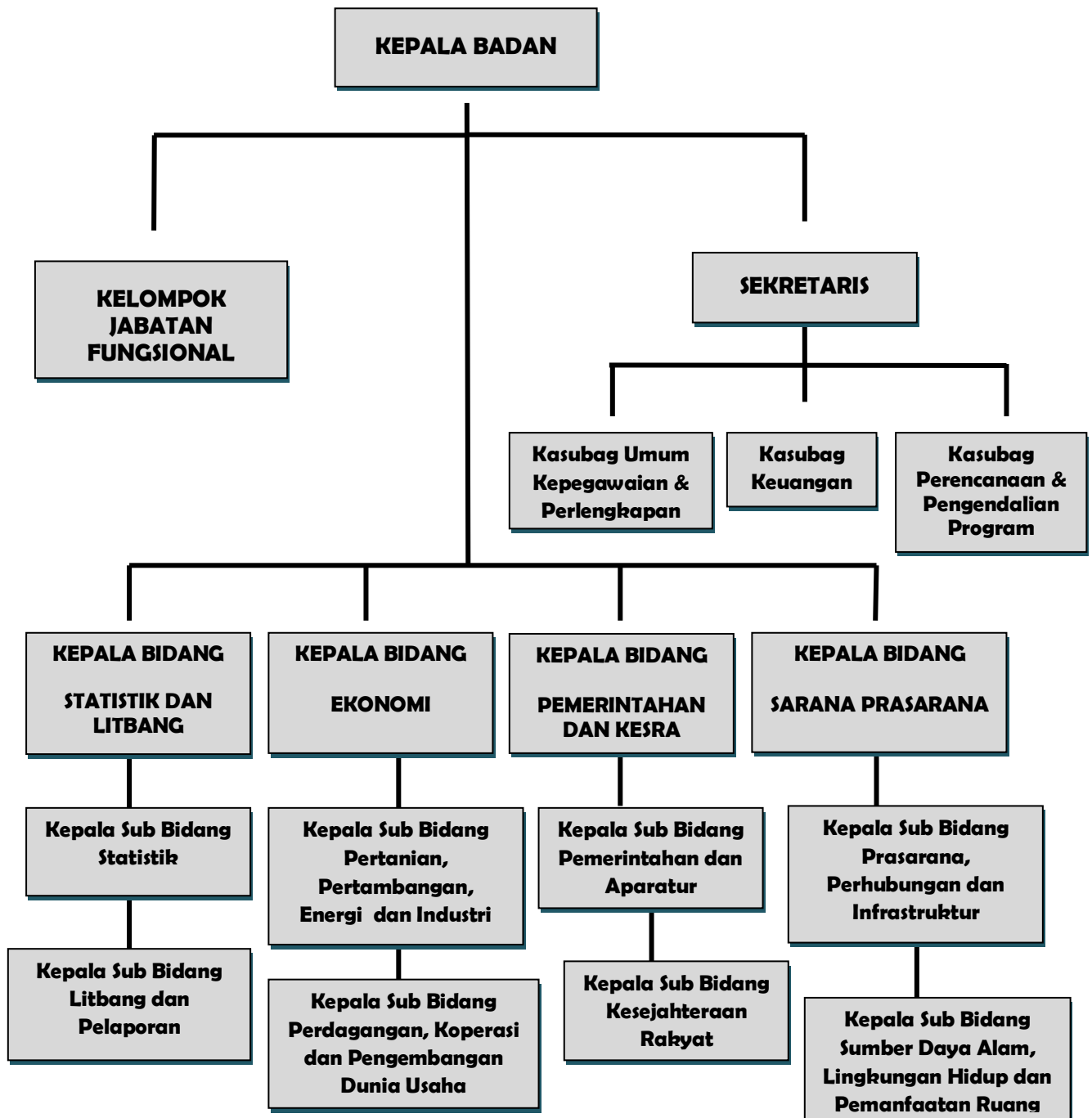
Hasil laporan kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis terhadap enam (6) sasaran kinerja, rata-rata semuanya telah memenuhi target yang ditetapkan atau capaiannya  $\pm 100\%$ .
2. Keberhasilan capaian indikator kinerja lebih dari 100% bukan berarti tanpa hambatan. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut : mengoptimalkan kerjasama seluruh bidang agar perencanaan menjadi lebih terarah, terukur dan terencana serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Demikian Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dimasa yang akan datang serta sebagai penyempurnaan dokumen berbagai kebijakan yang diperlukan.

**LAMPIRAN**

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016



**Perencanaan Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016**

| Indikator Kinerja Utama                            | Sasaran                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                        | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke |      |      |       |       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|-------|-------|
|                                                    |                                                                                                          |                                                                          | 1                                    | 2    | 3    | 4     | 5     |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ( RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan Peny. penganggaran | 1 Jumlah RPJM yang diPerkadakan                                          | 1                                    | 0    | 0    | 0     | 0     |
|                                                    |                                                                                                          | 2 Jumlah RKPD yang Diperdakan                                            | 1                                    | 1    | 1    | 1     | 1     |
|                                                    |                                                                                                          | 3 Jumlah RPJP Review yang diPerdakan                                     | 1                                    | 0    | 0    | 0     | 0     |
|                                                    |                                                                                                          | 4 Jumlah aplikasi                                                        | 1                                    | 1    | 1    | 1     | 2     |
|                                                    | Penelitian & pengembangan pemb. daerah yang optimal                                                      | 1 Jumlah penelitian                                                      | 0                                    | 1    | 1    | 1     | 1     |
|                                                    |                                                                                                          | 2 Jumlah penelitian yang dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan | 3                                    | 4    | 4    | 4     | 4     |
|                                                    | Dokumen Tata Ruang yang Sinergis dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                           | 1 Jumlah rapat BKPRD                                                     | 4                                    | 4    | 4    | 4     | 4     |
|                                                    |                                                                                                          | 2 Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun                                | 3                                    | 2    | 2    | 2     | 2     |
|                                                    | Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal.                   | 1 Jumlah rapat evaluasi bulanan                                          | 8                                    | 8    | 8    | 8     | 8     |
|                                                    |                                                                                                          | 2 Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi triwulan                       | 3                                    | 3    | 3    | 3     | 3     |
|                                                    |                                                                                                          | 3 Jumlah Rapat evaluasi tahunan dan rencana anggaran tahun berikutnya    | 1                                    | 1    | 1    | 1     | 1     |
|                                                    |                                                                                                          | 4 Jumlah LKPJ                                                            | 1                                    | 1    | 1    | 1     | 2     |
|                                                    |                                                                                                          | 5 Jumlah Rakor DAK & TP                                                  | 3                                    | 3    | 3    | 3     | 3     |
|                                                    |                                                                                                          | 6 Jumlah Rakor PM2L                                                      | 3                                    | 3    | 3    | 3     | 3     |
|                                                    |                                                                                                          | 7 Jumlah Rakor Penanggulangan Kemiskinan                                 | 3                                    | 3    | 3    | 3     | 3     |
|                                                    |                                                                                                          | 8 Jumlah Rakor MDGs                                                      | 2                                    | 2    | 2    | 2     | 2     |
|                                                    |                                                                                                          | 9 Jumlah Rakor Desa Tertinggal                                           | 2                                    | 2    | 2    | 2     | 2     |
|                                                    |                                                                                                          | 10 Jumlah Rakor Pengendalian Inflasi Daerah                              | 2                                    | 2    | 2    | 2     | 2     |
|                                                    |                                                                                                          | 11 Jumlah Rakor Makro & Mikro                                            | 1                                    | 1    | 1    | 1     | 1     |
|                                                    |                                                                                                          | 12 Jumlah Rakor Bidang Ekonomi                                           | 4                                    | 4    | 4    | 4     | 4     |
|                                                    |                                                                                                          | 13 Jumlah Rakor Bidang Sarana Prasarana                                  | 4                                    | 4    | 4    | 4     | 4     |
|                                                    |                                                                                                          | 14 Jumlah Rakor Bidang Pemkesra                                          | 4                                    | 4    | 4    | 4     | 4     |
|                                                    |                                                                                                          | 15 Jumlah Rapat Internal Bappeda                                         | 12                                   | 1    | 12   | 1     | 1     |
|                                                    |                                                                                                          | 16 Jumlah Monev Pembangunan Daerah                                       | 0                                    | 2    | 2    | 2     | 2     |
|                                                    |                                                                                                          | 17 Prosentase program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD                    | 70 %                                 | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % |

| Indikator Kinerja Utama | Sasaran                                                                                     | Indikator Kinerja                            | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke |   |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
|                         | Maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. | 1 Jumlah kerjasama antar daerah              | 1                                    | 2 | 2 | 2 | 2 |
|                         |                                                                                             | 2 Jumlah musrenbang Kecamatan                | 6                                    | 6 | 6 | 6 | 6 |
|                         |                                                                                             | 3 Jumlah Forum BAPPEDA                       | 1                                    | 1 | 1 | 1 | 1 |
|                         |                                                                                             | 4 Jumlah musrenbang Kabupaten                | 1                                    | 1 | 1 | 1 | 1 |
|                         | Optimalisasi koordinasi perencanaan penanaman modal.                                        | 1 Jumlah Koordinasi Penanaman Modal          | 2                                    | 2 | 2 | 2 | 2 |
|                         | Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda                                       | 1 Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi | 1                                    | 1 | 1 | 1 | 1 |
|                         |                                                                                             | 2 Jumlah pegawai yang terlatih               | 5                                    | 5 | 5 | 5 | 5 |
|                         |                                                                                             | 3 Jumlah SOP yang tersusun                   | -                                    | - | - | - | - |
|                         |                                                                                             | 4 Jumlah anggaran                            | -                                    | - | - | - | - |

**Capaian Realisasi Kinerja Fisik Tahun 2015 & Tahun 2016**

| No | Sasaran                                                                                                       | Indikator Sasaran |                                                             | Satuan     | Kinerja 2015 |           |             |                  | Kinerja 2016 |           |             |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------|-------------|------------------|
|    |                                                                                                               |                   |                                                             |            | Target       | Realisasi | % Realisasi | Kategori Capaian | Target       | Realisasi | % Realisasi | Kategori Capaian |
| 1. | Terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan Penyusunan penganggaran. | »                 | Jumlah RKPD yang Diperkadakan                               | Dokumen    | 1            | 2         | 200         | sangat berhasil  | 1            | 2         | 200         | sangat berhasil  |
|    |                                                                                                               | »                 | Jumlah aplikasi (SIPPD)                                     | Sistem     | 1            | 2         | 200         | sangat berhasil  | 2            | 2         | 100         | sangat berhasil  |
| 2. | Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang optimal.                                                  | »                 | Jumlah penelitian yang dihasilkan                           | Dokumen    | 1            | 4         | 400         | sangat berhasil  | 1            | 2         | 200         | sangat berhasil  |
| 3. | Dokumen tata ruang yang sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.                               | »                 | Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun                     | Dokumen    | 2            | 1         | 50          | tidak berhasil   | 2            | 0         | -           | tidak berhasil   |
| 4. | Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal.                        | »                 | Jumlah rapat evaluasi bulanan (TEPRA)                       | kali Rapat | 8            | 12        | 150         | sangat berhasil  | 8            | 10        | 125         | sangat berhasil  |
|    |                                                                                                               | »                 | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi triwulan (Rakordal) | kali Rapat | 3            | 3         | 100         | sangat berhasil  | 3            | 3         | 100         | sangat berhasil  |
|    |                                                                                                               | »                 | Jumlah LKPJ                                                 | Dokumen    | 1            | 1         | 100         | sangat berhasil  | 2            | 2         | 100         | sangat berhasil  |

| No | Sasaran                                                                                     |   | Indikator Sasaran                                  | Satuan     | Kinerja 2015 |    |       |                 | Kinerja 2016 |     |       |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|------------|--------------|----|-------|-----------------|--------------|-----|-------|-----------------|
|    |                                                                                             | » | Jumlah Rakor Bidang Ekonomi                        | kali Rapat | 4            | 3  | 75    | cukup berhasil  | 4            | 3   | 75    | cukup berhasil  |
|    |                                                                                             | » | Jumlah rakor Bidang sarana prasarana               | kali Rapat | 4            | 3  | 75    | cukup berhasil  | 4            | 11  | 275   | sangat berhasil |
|    |                                                                                             | » | Jumlah Rakor Pemkesra                              | kali Rapat | 4            | 3  | 75    | cukup berhasil  | 4            | 7   | 175   | sangat berhasil |
|    |                                                                                             | » | Jumlah Rapat Internal Bappeda                      | kali Rapat | 1            | 20 | 2.000 | sangat berhasil | 1            | 20  | 2.000 | sangat berhasil |
|    |                                                                                             | » | Jumlah Monev pembangunan daerah                    | Kunjungan  | 2            | 10 | 500   | sangat berhasil | 2            | 17  | 850   | sangat berhasil |
|    |                                                                                             | » | Prosentase program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD | %          | 100          | 98 | 98    | sangat berhasil | 100          | 100 | 100   | sangat berhasil |
| 5. | Maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. | » | Jumlah Musrenbang Kecamatan                        | kali Rapat | 6            | 6  | 100   | sangat berhasil | 6            | 6   | 100   | sangat berhasil |
|    |                                                                                             | » | Jumlah Forum BAPPEDA                               | kali Rapat | 1            | 1  | 100   | sangat berhasil | 1            | 1   | 100   | sangat berhasil |
|    |                                                                                             | » | Jumlah musrenbang Kabupaten                        | kali Rapat | 1            | 1  | 100   | sangat berhasil | 1            | 1   | 100   | sangat berhasil |
| 6. | Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda                                       | » | Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi         | Buah       | 1            | 5  | 500   | sangat berhasil | 1            | 22  | 2.200 | sangat berhasil |
|    |                                                                                             | » | Jumlah pegawai yang terlatih                       | Pegawai    | 5            | 13 | 260   | sangat berhasil | 5            | 15  | 300   | sangat berhasil |

**Matriks Analisis Efisiensi Sumber Daya Tahun 2015**

| Sasaran                                                                                                       | Indikator Sasaran |                                   | Satuan  | % realisasi kinerja fisik | Program                                 | Kegiatan                                                     | Kinerja Keuangan |                 |             | % Efisiensi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                               |                   |                                   |         |                           |                                         |                                                              | Pagu (Rp.)       | Realisasi (Rp.) | % Realisasi |             |
| Terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan Penyusunan penganggaran. | »                 | Jumlah RKPD yang Diperkadakan     | Dokumen | 200                       | Program perencanaan pembangunan daerah  | Penyusunan rancangan RKPD                                    | 29.636.250,00    | 29.636.250,00   | 100         | -           |
|                                                                                                               |                   |                                   |         |                           |                                         | Penyelenggaraan musrenbang RKPD                              | 180.202.250,00   | 171.905.250,00  | 95          | 5           |
|                                                                                                               |                   |                                   |         |                           |                                         | Penetapan RKPD                                               | 50.295.000,00    | 48.798.000,00   | 97          | 3           |
|                                                                                                               | »                 | Jumlah aplikasi (SIPPD)           | Buah    | 200                       | Program perencanaan pembangunan daerah  | Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah | 100.540.000,00   | 0               | -           | 100         |
| Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang optimal.                                                  | »                 | Jumlah penelitian yang dihasilkan | Dokumen | 400                       | Program perencanaan pembangunan ekonomi | Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah             | 235.487.010,00   | 221.452.500,00  | 94          | 6           |
|                                                                                                               |                   |                                   |         |                           |                                         | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat       | 54.332.500,00    | 38.877.500,00   | 72          | 28          |

| Sasaran                                                                                | Indikator Sasaran | Satuan                                                       | %          | Program | Kegiatan                                                            | Kinerja Keuangan                                                             |                |                | %  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|----|
| Dokumen tata ruang yang sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.        | »                 | Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun                      | Dokumen    | 50      | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | 169.681.100,00 | 154.537.911,00 | 91 | -  |
|                                                                                        |                   |                                                              |            |         | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah & Besar         | Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan            | 73.470.000,00  | 57.823.577,00  | 79 | -  |
| Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal. | »                 | Jumlah rapat evaluasi bulanan (TEPRA)                        | kali Rapat | 150     | Program perencanaan pembangunan daerah                              | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah    | 359.569.250,00 | 311.943.950,00 | 87 | 13 |
|                                                                                        | »                 | Jumlah penyelenggara an rapat koordinasi triwulan (Rakordal) | kali Rapat | 100     |                                                                     |                                                                              |                |                |    |    |
|                                                                                        | »                 | Jumlah LKPJ                                                  | Dokumen    | 100     |                                                                     | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)          | 59.390.750,00  | 57.958.750,00  | 98 | 2  |
|                                                                                        | »                 | Jumlah Rakor Bidang Ekonomi                                  | kali Rapat | 75      | Program perenc. pembangunan ekonomi                                 | Koordinasi perenc. pembangunan bidang ekonomi                                | 54.332.500,00  | 38.877.500,00  | 72 | -  |

| Sasaran | Indikator Sasaran |                                                    | Satuan     | %     | Program                                                 | Kegiatan                                                                  | Kinerja Keuangan |                |    | %  |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----|----|
|         | »                 | Jumlah rakor Bidang sarana prasarana               | kali Rapat | 75    | Program Perencanaan Pengemb. Kota-Kota Menengah & Besar | Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan         | 73.470.000,00    | 57.823.577,00  | 79 | 21 |
|         |                   |                                                    |            |       | Program perencanaan prasarana wilayah & SDA             | Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah             | 176.200.000,00   | 175.168.000,00 | 99 | 1  |
|         | »                 | Jumlah Rakor Pemkesra                              | kali Rapat | 75    | Program perencanaan pembangunan sosial budaya           | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya               | 110.941.750,00   | 102.169.600,00 | 92 | 8  |
|         | »                 | Jumlah Rapat Internal Bappeda                      | kali Rapat | 2.000 | Program Pelayanan Adm. Perkantoran                      | Penyediaan makanan dan minuman                                            | 22.198.000,00    | 20.077.000,00  | 90 | 10 |
|         | »                 | Jumlah Monev pembangunan daerah                    | Kunjungan  | 500   | Program perencanaan pembangunan daerah                  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | 359.569.250,00   | 311.943.950,00 | 87 | 13 |
|         |                   |                                                    |            |       | Program perencanaan pembangunan sosial budaya           | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                        | 55.150.750,00    | 49.301.050,00  | 89 | 11 |
|         | »                 | Prosentase program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD | %          | 98    | Program perencanaan pembangunan daerah                  | Penetapan RKPD                                                            | 50.295.000,00    | 48.798.000,00  | 97 | 3  |

| Sasaran                                                                                     | Indikator Sasaran |                                            | Satuan     | %   | Program                                            | Kegiatan                                                   | Kinerja Keuangan |                |    | % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----|---|
| Maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. | »                 | Jumlah Musrenbang Kecamatan                | kali Rapat | 100 | Program perencanaan pembangunan daerah             | Penyelenggaraan musrenbang RKPD                            | 180.202.250,00   | 171.905.250,00 | 95 | 5 |
|                                                                                             | »                 | Jumlah Forum BAPPEDA                       | kali Rapat | 100 |                                                    |                                                            |                  |                |    |   |
|                                                                                             | »                 | Jumlah musrenbang Kabupaten                | kali Rapat | 100 |                                                    |                                                            |                  |                |    |   |
| Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda                                       | »                 | Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi | Buah       | 500 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran         | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor               | 169.910.000      | 168.152.000    | 99 | 1 |
|                                                                                             |                   |                                            |            |     | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                       | 70.000.000       | 69.460.000     | 99 | 1 |
|                                                                                             | »                 | Jumlah pegawai yang terlatih               | Pegawai    | 260 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 103.300.000,00   | 100.380.330,00 | 97 | 3 |

**Matriks Analisis Efisiensi Sumber Daya Tahun 2016**

| Sasaran                                                                                                       | Indikator Sasaran |                                   | Satuan  | % realisasi kinerja fisik | Program                                 | Kegiatan                                                     | Kinerja Keuangan |                 |             | % Efisiensi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                                                                                                               |                   |                                   |         |                           |                                         |                                                              | Pagu ( Rp.)      | Realisasi (Rp.) | % Realisasi |             |
| Terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan Penyusunan penganggaran. | »                 | Jumlah RKPD yang Diperkadakan     | Dokumen | 200                       | Program perencanaan pembangunan daerah  | Penyusunan rancangan RKPD                                    | 37.205.000       | 32.705.000      | 88          | 12          |
|                                                                                                               |                   |                                   |         |                           |                                         | Penyelenggaraan musrenbang RKPD                              | 165.379.000      | 161.840.000     | 98          | 2           |
|                                                                                                               |                   |                                   |         |                           |                                         | Penetapan RKPD                                               | 57.464.500       | 53.840.500      | 94          | 6           |
|                                                                                                               | »                 | Jumlah aplikasi (SIPPD)           | Buah    | 100                       | Program perencanaan pembangunan daerah  | Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah | 140.000.000      | 115.280.000     | 82          | 18          |
| Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang optimal.                                                  | »                 | Jumlah penelitian yang dihasilkan | Dokumen | 200                       | Program perencanaan pembangunan ekonomi | Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah             | 211.502.500      | 185.216.901     | 88          | 12          |
|                                                                                                               |                   |                                   |         |                           |                                         | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat       | 213.701.900      | 187.566.000     | 88          | 12          |

| Sasaran                                                                                | Indikator |                                                          | Satuan     | %   | Program                                                           | Kegiatan                                                                     | Kinerja Keuangan |             |    | %  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----|----|
| Dokumen tata ruang yang sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.        | »         | Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun                  | Dokumen    | -   | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & cepat tumbuh | Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | 116.670.000      | 86.257.001  | 74 | -  |
|                                                                                        |           |                                                          |            |     | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah & Besar       | Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan            | 76.363.750       | 61.818.750  | 81 | -  |
| Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal. | »         | Jumlah rapat evaluasi bulanan (TEPRA)                    | kali Rapat | 125 | Program perencanaan pembangunan daerah                            | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah    | 254.890.000      | 245.701.000 | 96 | 4  |
|                                                                                        | »         | Jumlah pnyinggaraan rapat koordinasi triwulan (Rakordal) | kali Rapat | 100 |                                                                   |                                                                              |                  |             |    |    |
|                                                                                        | »         | Jumlah LKPJ                                              | Dokumen    | 100 |                                                                   | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)          | 131.596.000      | 118.082.000 | 90 | 10 |

| Sasaran | Indikator |                                         | Satuan     | %     | Program                                             | Kegiatan                                                            | Kinerja Keuangan |             |    | %  |
|---------|-----------|-----------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----|----|
|         | »         | Jumlah Rakor Bidang Ekonomi             | kali Rapat | 75    | Program perencanaan pembangunan ekonomi             | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi                   | 86.239.000       | 50.864.000  | 59 | 41 |
|         | »         | Jumlah rakor Bidang sarana prasarana    | kali Rapat | 275   | Program Perenc. Pengemb. Kota-Kota Menengah & Besar | Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan   | 76.363.750       | 61.818.750  | 81 | 19 |
|         |           |                                         |            |       | Program perenc. prasarana wilayah dan SDA           | Koordinasi peny. masterplan prasarana perhubungan daerah            | 56.133.000       | 39.699.950  | 71 | 29 |
|         | »         | Jumlah Rakor Pemkesra                   | kali Rapat | 175   | Program perenc. pemb. sosial budaya                 | Koordinasi perenc. pembangunan bidang sosial dan budaya             | 95.125.000       | 88.915.300  | 93 | 7  |
|         | »         | Jumlah Rapat Internal Bappeda           | kali Rapat | 2.000 | Program Pelayanan Adm. Perkantoran                  | Penyediaan makanan dan minuman                                      | 34.420.000       | 26.200.000  | 76 | 24 |
|         | »         | Jumlah Monev pemb. daerah               | Kunjungan  | 850   | Program perencanaan pembangunan daerah              | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pemb. daerah | 254.890.000      | 245.701.000 | 96 | 4  |
|         |           |                                         |            |       | Program perencanaan pembangunan sosial budaya       | Monitoring, evaluasi dan pelaporan                                  | 60.709.000       | 47.649.000  | 78 | 22 |
|         | »         | % program RPJMD yg tertuang dalam RAPBD | %          | 100   | Program perencanaan pembangunan daerah              | Penetapan RKPD                                                      | 57.464.500       | 53.840.500  | 94 | 6  |

| Sasaran                                                                                     | Indikator |                                            | Satuan     | %     | Program                                            | Kegiatan                                                   | Kinerja Keuangan |             |     | %  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|----|
| Maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. | »         | Jumlah Musrenbang Kecamatan                | kali Rapat | 100   | Program perencanaan pembangunan daerah             | Penyelenggaraan musrenbang RKPD                            | 165.379.000      | 161.840.000 | 98  | 2  |
|                                                                                             | »         | Jml Forum BAPPEDA                          | kali Rapat | 100   |                                                    |                                                            |                  |             |     |    |
|                                                                                             | »         | Jumlah musrenbang Kabupaten                | kali Rapat | 100   |                                                    |                                                            |                  |             |     |    |
| Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda                                       | »         | Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi | Buah       | 2.200 | Program Pelayanan Adm. Perkantoran                 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor               | 28.850.000       | 25.934.561  | 90  | 10 |
|                                                                                             |           |                                            |            |       | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                       | 32.000.000       | 31.920.000  | 100 | 0  |
|                                                                                             |           |                                            |            |       |                                                    | Pengadaan mebeleur                                         | 30.000.000       | 30.000.000  | 100 | -  |
|                                                                                             |           |                                            |            |       |                                                    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                   | 55.000.000       | 47.618.000  | 87  | 13 |
|                                                                                             | »         | Jumlah pegawai yang terlatih               | Pegawai    | 300   | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 115.000.000      | 97.490.012  | 85  | 15 |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

| No. | Sasaran                                                                                                       | Indikator Kinerja                                             | Target       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) sebagai acuan Penyusunan penganggaran. | 1 Jumlah RKPD yang Diperkadakan                               | 1 Dokumen    |
|     |                                                                                                               | 2 Jumlah aplikasi (SIPPD)                                     | 1 Aplikasi   |
| 2.  | Penelitian & pengembangan pembangunan daerah yang optimal.                                                    | 1 Jumlah penelitian yang dihasilkan                           | 1 Dokumen    |
| 3.  | Dokumen tata ruang yang sinergis dengan dokumen perencanaan Pembangunan daerah.                               | 1 Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun                     | 2 Dokumen    |
| 4.  | Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang optimal.                        | 1 Jumlah rapat evaluasi bulanan (TEPRA)                       | 8 kali Rapat |
|     |                                                                                                               | 2 Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi triwulan (Rakordal) | 3 kali Rapat |
|     |                                                                                                               | 3 Jumlah LKPJ                                                 | 2 Dokumen    |
|     |                                                                                                               | 4 Jumlah Rakor Bidang Ekonomi                                 | 4 kali Rapat |
|     |                                                                                                               | 5 Jumlah rakor Bidang Sarana Prasarana                        | 4 kali Rapat |
|     |                                                                                                               | 6 Jumlah Rakor Pemkesra                                       | 4 kali Rapat |
|     |                                                                                                               | 7 Jumlah Rapat Internal Bappeda                               | 1 kali Rapat |
|     |                                                                                                               | 8 Jumlah Monev pembangunan daerah                             | 2 Kunjungan  |
|     |                                                                                                               | 9 Prosentase program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD          | 100 %        |
| 5.  | Maksimalisasi koordinasi lintas sektoral antar pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.                   | 1 Jumlah Musrenbang Kecamatan                                 | 6 kali Rapat |
|     |                                                                                                               | 2 Jumlah Forum BAPPEDA                                        | 1 kali Rapat |
|     |                                                                                                               | 3 Jumlah musrenbang Kabupaten                                 | 1 kali Rapat |

| No. | Sasaran                                               | Indikator Kinerja                            | Target    |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 6.  | Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda | 1 Jumlah Sarana dan prasarana yang terpenuhi | 1 Buah    |
|     |                                                       | 2 Jumlah pegawai yang terlatih               | 5 Pegawai |

Program

|     |                                                                                |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 946.038.400,00   |
| 2.  | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | 283.200.000,00   |
| 3.  | Program peningkatan disiplin aparatur                                          | 22.500.000,00    |
| 4.  | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                             | 115.000.000,00   |
| 5.  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.839.000,00     |
| 6.  | Program Pengembangan data/informasi                                            | 269.613.950,00   |
| 7.  | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh            | 116.670.000,00   |
| 8.  | Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar                  | 76.363.750,00    |
| 9.  | Program perencanaan pembangunan daerah                                         | 1.023.579.500,00 |
| 10. | Program perencanaan pembangunan ekonomi                                        | 511.443.400,00   |
| 11. | Program perencanaan pembangunan sosial budaya                                  | 155.834.000,00   |
| 12. | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam                     | 56.133.000,00    |

Pangkalan Bun,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA BAPPEDA  
KAB.KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**TTD**

**Drs. H. NURUL EDY, M.Si**

**Drs. WAHYUDI, M.Si  
NIP. 19630923 199003 1 010**